

Pemkot Jakbar Ajak 40 Perusahaan Ikut Bursa Kerja di Season City

JAKARTA (IM) - Suku Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Barat (Sudin Nakertransgi Jakbar) melibatkan 40 perusahaan swasta dalam bursa kerja (*job fair*) yang akan digelar di Mall Season City, Kecamatan Tambora, Jakbar pada Rabu (2/11). Kegiatan itu diadakan untuk membantu warga Jakbar mendapatkan pekerjaan sehingga tingkat perekonomian meningkat.

"Ada 40 perusahaan yang akan terlibat. Mayoritas perusahaan berlokasi di wilayah Jakarta Barat dan bergerak di bidang jasa dan retail," kata Kepala Seksi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas, dan Transmigrasi Sudin Nakertransgi Jakbar, Muhamad Yasil Farabi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/11).

Yasil mengatakan, ke-40 perusahaan tersebut, sebelumnya sudah melalui proses penyeleksian dengan ketat. Penyeleksian itu di-

lakukan demi memastikan perusahaan yang ikut serta tidak pernah sengketa kepegawaian lainnya.

"Kita juga punya rekam jejak perusahaan mana saja yang sekiranya pernah bermasalah di Jakarta Barat," kata Yasil.

Tercatat ada lebih dari 20 ribu posisi pekerjaan ditawarkan dalam ajang yang akan berlangsung selama dua hari ini. "Ini terbuka untuk lulusan SMA sederajat, Sarjana satu dan seterusnya," jelas dia.

Dia memastikan kegiatan itu akan mulai dibuka pukul 10.00 WIB dan diselenggarakan di lantai dua mal Season City. Warga juga tidak diharuskan mendaftar secara daring sebelum datang ke lokasi bursa kerja. "Bisa langsung datang saja, tapi setelah sampai di lokasi diharapkan mendaftar *online* di tempat untuk pencatatan di pihak kita," terang Yasil. ● yan

Pemkot Jakbar 'Jemput Bola' Penyandang Disabilitas yang Ingin Buat KTP

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) membuka layanan jemput bola perekaman data untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) bagi warga penyandang disabilitas. Layanan jemput bola itu diadakan guna memudahkan warga penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak memilih dan memperbaharui KTP.

"Kita buka permintaan perekaman data untuk warga disabilitas dan kita lakukan selama satu minggu sekali," kata Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakbar, Gentina Arifin saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/11).

Gentina menerangkan, warga penyandang disabilitas yang ingin melakukan perekaman KTP bisa langsung menghubungi petugas Sudin Dukcapil Jakbar melalui akun Instagram @dukcapiljakbar atau melalui kelurahan dan kecamatan setempat.

Laporan yang masuk itu akan dilayani pihak Suku Dinas Dukcapil setiap hari Rabu.

"Jadi kita akan sambangi rumah yang meminta pelayanan di setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu kita bisa menghampiri dua sampai tiga rumah," jelas Gentina.

Dia menyebutkan, respon warga cukup antusias dengan hadirnya layanan tersebut. Hal itu karena layanan jemput bola sangat memudahkan para penyandang disabilitas. Gentina pun memastikan akan terus memberlakukan layanan sistem jemput bola ini guna memenuhi hak warga mendapatkan KTP layak.

Sebelumnya, tidak hanya layanan jemput bola untuk warga penyandang disabilitas.

Sudin Dukcapil juga membuka layanan bertajuk 'Rabu Petang'. Dalam layanan itu, petugas melayani beragam permasalahan masyarakat terkait kependudukan dan catatan sipil di kantor Sudin Dukcapil Jakbar hingga pukul 19.30 WIB. ● yan



FOTO: ANI

PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH MELEBIHI PERBANKAN UMUM

Nasabah menukarkan sampah plastik menjadi saldo uang elektronik pada mesin daur ulang di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Thamrin, Jakarta, Selasa (1/11). Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah mencapai 19 persen (*year on year*) pada September 2022 atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan umum yang hanya naik 11 persen (*year on year*).

Selama 10 Bulan Satpol PP Kab. Tangerang Garuk 33 PSK

TANGERANG (IM) - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi mengatakan, pihaknya telah menggaruk 33 Pekerja Seks Komersil (PSK) selama 10 bulan terakhir.

Total ada sebanyak 442 pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ada di Kabupaten Tangerang yang telah dilakukan penindakan.

"Dalam operasi yang kami lakukan selama 10 bulan terakhir, kami mencatat ada 442 pelanggaran Perda dan Perkada terkait gangguan Trantibum yang sudah kami lakukan penindakan lewat sidang tindak pidana ringan (Tipiring). Dengan rincian 307 penindakan terhadap bangunan liar, 102 PKL dan juga 33 PSK," katanya, Selasa (1/11).

Ya juga mengatakan, dalam rapat evaluasi ini dirinya juga meminta kepada para anggotanya untuk selalu mengedepankan sikap humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya juga meminta ke-

pada seluruh pegawai agar lebih mengedepankan cara humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Di akhir rapat, Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pegawai Satpol PP yang selama ini sudah menjalankan tugas dengan baik.

Ia berharap dengan adanya rapat ini dapat meningkatkan kinerja anggotanya dalam melakukan penegakan Perda di wilayah Kabupaten Tangerang.

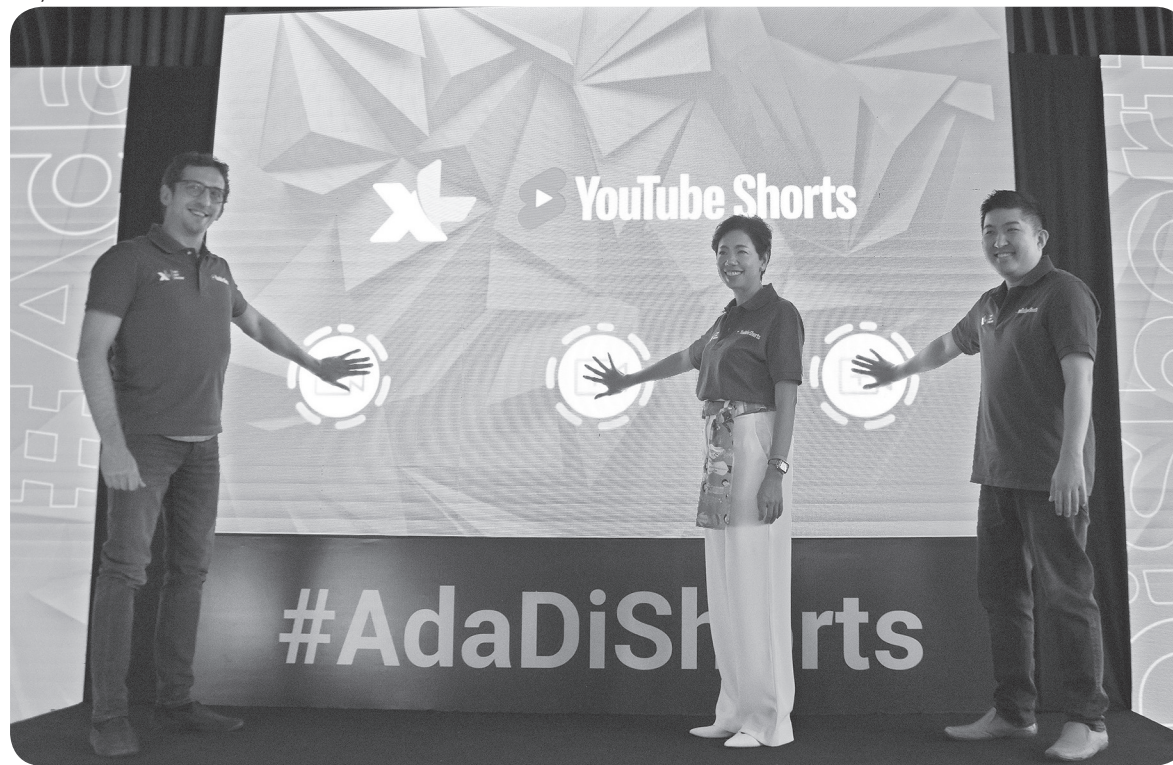
"Rapat evaluasi ini kami lakukan guna mengevaluasi hasil kinerja Satpol PP dari awal hingga akhir tahun 2022 ini. Tentunya ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja Satpol PP kedepannya," ujarnya.

Sebagai informasi, rapat evaluasi kinerja ini dihadiri oleh seluruh pejabat eselon III dan IV serta staf, dan Sekretaris di lingkup Satpol PP Kabupaten Tangerang.

Rapat ini juga dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Fachrul Rozi. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



XL AXIATA HADIRKAN UNLIMITED YOUTUBE SHORTS

Direktur and Chief Digital Transformation & Enterprise Business Officer XL Axiata Yessie D Yosetya (tengah) berfoto bersama dengan Chief Marketing Officer XL Axiata Alfons Bosch Sansa (kiri), dan Country Head YouTube Indonesia Suwandi Widjaja (kanan) setelah secara simbolis meluncurkan program Unlimited YouTube Shorts di Jakarta, Selasa (1/11). XL berkolaborasi dengan YouTube menghadirkan program "Unlimited YouTube Shorts" dengan harga Rp 1, pelanggan bisa mengakses YouTube Shorts sepuasnya selama satu jam yang bisa didapatkan satu kali per minggu melalui aplikasi myXL.

Hindari Kemacetan, Pengamat Usul Sebagian Karyawan di Jakpus dan Jaksel WFH

Banyak pekerja yang berasal dari Bekasi dan Depok menuju perkantoran di dua wilayah tersebut saat jam kerja. Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan itu kantong perkantoran. Data yang paling banyak (warga yang) menggunakan mobil itu dari Kota Bekasi dan Depok.

JAKARTA (IM) - Pengamat tata kota Yayat Supriatna menyampaikan usulan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengendalikan pergerakan orang ke kantor-kantor di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Hal itu disampaikan Yayat dalam focus group discussion (FGD) uji coba pengaturan jam kerja di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (1/11).

Sebab, menurut Yayat, banyak pekerja berasal dari Bekasi dan Depok menuju perkantoran di dua wilayah tersebut saat jam kerja.

"Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan itu kantong perkantoran. Data yang paling banyak (warga yang) menggunakan mobil itu dari Kota Bekasi dan Depok. Kelas menengah ke atas," ujar dosen Universitas Trisakti itu.

Sehingga, lanjut Yayat, terjadi kemacetan di Tol Jagorawi karena banyak mobil dari Bekasi atau Depok menuju Jakarta saat jam kerja. "Jadi banyak macet di Jagorawi," kata Yayat. Yayat mengusulkan, agar

lakukan secara hati-hati. Sebab, pemerintah pusat turut terlibat dalam program pengaturan jam kerja tersebut.

Semua Ditampung

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyampaikan kabar terbaru terkait wacana pengaturan jam kerja di Jakarta. Dishub DKI bakal menampung masukan dari berbagai pihak untuk mengurai kemacetan Jakarta.

"Dari Dishub DKI prinsipnya semua masukan dan pengamat kitaampung, kita terima, dan nanti ke depannya kita sampaikan kepada tim lagi. Nanti kan ada timnya ya, kita mengkaji tim dari terkait unsur organisasi yang ada di lingkungan pemerintah daerah, khususnya birokrasi, misalnya Biro Hukum, dari Biro DKD, kemudian dari Dishub sendiri, dari Disnaker nanti kita duduk satu sama di bawah pimpinan asisten terkait, untuk membahas lebih lanjut dari FGD ini," kata Wakil Kepala

Dishub DKI, Chaidir kepada wartawan, Selasa (1/11). Chaidir mengatakan akan menyampaikan hasil dari FGD dalam waktu dekat. Kemudian dia berbicara kemungkinan dibentuknya peraturan gubernur (pergub) terkait pengaturan jam kerja.

"Insya Allah target dalam waktu dekat akan kami sampaikan hasil FGD ini dan nanti beberapa masukan-masukan, kan tadi dari para pakar salah satunya kemungkinan kita akan

buat apakah dalam bentuk regulasinya pergub, kepgub, atau imbauan," ujarnya.

Menurutnya, jika hanya di lingkungan Pemprov DKI, cukup dengan imbauan saja. Namun, kata Chaidir, hal itu juga harus mempertimbangkan instansi-instansi lainnya di luar Pemprov DKI.

Dia menyebut akan membahas lebih lanjut terkait jam kerja untuk mengurai kema-

cetan. Menurutnya, ada kemungkinan aturannya dalam bentuk pergub, kepgub, dan imbauan.

"Nanti bentuknya kemungkinan kita akan bahas lagi, apa bentuknya pergub atau kepgub, tapi kalau untuk berlakukan di lingkungan ASN di DKI saja di luar kementerian, nanti kita lihat bentuknya apakah bentuknya imbauan atau pergub atau kepgub," tuturnya. ● yan

FOTO: ANI



JELANG INDO DEFENCE EXPO AND FORUM 2022

Pekerja menyelesaikan pembangunan stan peserta pameran pertahanan 'Indo Defence Expo and Forum 2022' di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (1/11). Pameran industri pertahanan 2022 tersebut diikuti 905 perusahaan dari 59 negara dengan bertemakan 'Peace, Prosperity, Strong Defence' yang akan berlangsung pada 2-5 November mendatang.

Kemacetan di Perlintasan Kereta Api Citayam Depok Semakin Parah

DEPOK (IM) - Aris lalu lintas di Jalan Raya Citayam, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat macet parah. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Citayam yakni keberadaan perlintasan kereta api dan banyaknya angkutan yang mengetem.

Untuk mengurangi kemacetan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat segera merealisasikan pembangunan terowongan atau underpass di Citayam yang menghubungkan Kota Depok dengan Pabuaran Kabupaten Bogor.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Marbudiantono mengatakan harus diwujudkan pembangunan terowongan bawah tanah kalau Citayam tidak ingin macet. Karena tiap harinya puluhan ribu kendaraan bermotor melintas yang mengakibatkan kemacetan di jalur ini.

Marbudiantono menyampaikan dalam sehari, 75.338 lebih kendaraan bermotor melintas di perlintasan tersebut. Dari Kota Depok ke arah Pabuaran Kabupaten Bogor jumlah kendaraan yang melintas 36.854 kendaraan. Sebaliknya jumlah kendaraan yang melintas dari Pabuaran Kabupaten Bogor ke Kota Depok 38.493 kendaraan. Begitupun dengan kereta api yang melintas dari Jakarta ke Pabuaran Kabupaten Bogor tiap hari juga tinggi yakni 150 kereta api pulang pergi. Belum lagi kereta api dari Jakarta ke Pabuaran Kabupaten Bogor tiap hari juga tinggi yakni 150 kereta api pulang pergi. "Ada 9 kereta api dari Jakarta ke Nambo tiap hari dengan jarak 1 kereta api dengan kereta api lainnya (*headway*)

sekitar lima menit, kereta api inilah yang menyebabkan jalan Cityam semakin parah," ungkap Marbudiantono, Selasa (1/11).

Perlntasan kereta api diatur dalam UU nomor 22/2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), tentang moda transportasi kereta api harus diprioritaskan jika melintas. Di Kota Depok, jumlah persimpangan jalur kereta dan jalan raya masih begitu banyak.

Pintu perlntasan kereta api itu ada yang dijaga ada yang tidak. Baik resmi maupun liar. Ditambah pula dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap harinya. Hal itu memicu tersendatnya arus lalu lintas.

"Seperti yang terdapat di perlntasan kereta api Rawa Geni Pancoran Mas. Perlntasan itu menjadi akses bagi pengendara dari arah Jalan Raya Citayam menuju ke Bojonegara, "ujarnya.

Petugas keamanan yang ditemui di salah satu perkantoran yang lokasinya tak jauh dari pintu perlntasan kereta api, Kumar, mengatakan, kondisi lalu lintas lebih padat hari ini daripada hari-hari sebelumnya.

"Kemarini ramai juga, tapi tidak seramai ini," katanya Selasa (1/11). Kumar menyebutkan, kendaraan tampak lebih padat pada jam pulang kantor, yakni mulai pukul 17.00 WIB-19.00 WIB.

Dia mengatakan, pada saat tersebut sepanjang Jalan Citayam bisa macet total. Sebab, penyempitan jalan hingga 3 meter itu sangat mempengaruhi kelancaran lalu lintas. "Pokoknya macetnya parah," kata Kumar. ● yan



PENGUMUMAN PT. MULTI BINTANG INDONESIA Tbk ("Perseroan") TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN TAHUN 2022

Dengan ini diumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan tertanggal 31 Oktober 2022, Perseroan akan membagikan dividen interim dari laba bersih Perseroan per tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp. 43.000 (empat puluh tiga Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp. 90.601.000.000,00 (sembilan puluh miliar enam ratus satu juta Rupiah) kepada pemegang/pemilik 2.107.000.000 (dua miliar seratus tujuh juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 November 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("Pemegang Saham Yang Berhak"). Keputusan Direksi Perseroan untuk membagikan dividen interim tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris, tertanggal 31 Oktober 2022.

Jadwal pembagian dividen interim Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Tanggal
1	Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 31 Oktober 2022 atas Keputusan Direksi terkait pembagian Dividen Interim 2022	31-Oct-22
2	Menyampaikan jadwal pembagian dividen	2-Nov-22
3	Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	10-Nov-22
4	Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	11-Nov-22
5	Cum dividen di Pasar Tunai	14-Nov-22
6	Ex dividen di Pasar Tunai	15-Nov-22
7	Recording Date yang berhak atas dividen	14-Nov-22
8	Pembayaran Dividen	30-Nov-22

Tatacara pembayaran dividen interim adalah sebagai berikut:

- Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen interim akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
- Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran dividen interim akan dilakukan dengan pemindahbukuan (*transfer bank*) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak. Untuk itu, dimohon Pemegang Saham Yang Berhak untuk memberitahukan: Nama, Nama Bank, alamat Bank serta Nomor Rekening melalui surat tertulis yang ditandatangani di atas meterai, paling lambat tanggal 14 November 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Raya Saham Registrasi, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon (021) 2525666 ("BAE"), tanpa dikenakan biaya administrasi.
- Untuk pembagian dividen interim tersebut dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan. Untuk pemegang saham asing yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26, pemegang saham asing yang bersangkutan wajib menyerahkan asil surat keterangan domisili:
 - kepada BAE Perseroan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI; dan
 - kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI.

-selambatnya pada tanggal 14 November 2022 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, di mana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

-Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 atau kepada BAE Perseroan selambatnya pada tanggal 14 November 2022 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

4. Pembayaran Dividen dilakukan paling lambat pada tanggal 30 November 2022.

Jakarta, 2 November 2022

Direksi PT. Multi Bintang Indonesia Tbk